Materi 4

1. Pengaruh kebijakan pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia

Berbagai komoditas perdagangan yang dihasilkan bangsa Indonesia lah yang menjadi incaran bangsa-bangsa Barat. Berbagai hasil bumi Indonesia tidak hanya menjadi konsumsi bangsa-bangsa Asia, tetapi juga menjadi salah satu incaran bangsa-bangsa Barat. Indonesia dan bangsa- bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Pengaruh lokasi telah memberikan perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Bangsa Indonesia harus senantiasa bersyukur karena dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa hidup di daerah tropis.

Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia di atas menandai era penjajahan bangsa Indonesia. Satu demi satu daerah di Indonesia dikuasai bangsa asing. Penjajahan telah menyebabkan penderitaan bangsa Indonesia. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia. Akibatnya bangsa Indonesia melakukan perlawanan untuk mengusir penjajah.

1. Monopoli dalam Perdagangan

Monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Belanda jelas merugikan rakyat. Kalian dapat membayangkan bagaimana perasaan para petani yang ingin menjual hasil pertanian, tetapi dipaksa hanya menjual kepada VOC? Tentu daya tawar harga yang mereka dapatkan sangat rendah. Pada awal kedatangan bangsa-bangsa Barat, rakyat Indonesia menerima dengan baik. Rakyat di berbagai daerah memandang perdagangan merupakan hubungan baik kepada siapapun. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli.

Awalnya VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang. Lama-lama berkembang menjadi penguasaan pasar (monopoli). VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi juga menguasai politik atau pemerintahan.

Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Bagaimana dampak yang terjadi akibat monopoli? Bagi pelaku perusahaan monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapa menentukan harga beli dan harga jual. Sebagai contoh pada saat VOC melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Nah, karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual harganya sangat melambung.

Semua itu terjadi karena keterpaksaan. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk mengizinkan terjadinya monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal devide et impera. SAdu domba yang dilakukan Belanda dapat terjadi terhadap kerajaan dengan kerajaan, atau antar pejabat kerajaan. Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia, sehingga terjadi perang antar kerajaan. Belanda juga terlibat dalam konflik yang terjadi di dalam kerajaan. Pada saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Demikian halnya saat terjadi konflik di dalam kerajaan, Belanda akan mendukung salah satu pihak. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, Belanda akan meminta balas jasa.

Setelah selesai perang Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Akibat monopoli inilah rakyat Indonesia sangat menderita. Mengapa demikian? Dengan adanya monopoli rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah, padahal apabila rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. Sekarang kalian telah memahami bagaimana dampak monopoli dan adu domba VOC terhadap kerajaan-kerajaan dan rakyat Indonesia. Sekarang coba lakukan pencarian beberapa kegiatan monopoli dan adu domba yang dilakukan VOC terhadap bangsa Indonesia.

1. Kerja Paksa

Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Mereka tidak memperoleh penghasilan yang layak, tidak diperhatikan asupan makanannya, dan melakukan pekerjaan di luar batas-batas kemanusiaan. Jalur Anyer Panarukan yang memanjang lebih dari 1000 Km dari Cilegon (Banten), Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Panarukan (Jawa Timur). Saat ini jalur tersebut merupakan salah satu jalur utama bagi masyarakat di pulau Jawa. Anyer Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Hindia Belanda.

Jalan Raya Pos (Anyer-Panarukan) sangat penting bagi Pemerintah Kolonial Belanda. Jalan Anyer-Panarukan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut berbagai hasil bumi, dan hingga sekarang manfaat jalan tersebut masih dapat dirasakan. Di balik besarnya proyek tersebut, perlu dipertanyakan bagaimana proses pembangunan jalan yang melewati gunung yang terjal dan medan yang sulit pada masa lalu? Siapakah yang menjalankan pembangunan? Pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Herman Willem Daendels yang berkuasa sejak tahun 1808-1811. Belanda memandang penting pembangunan jalur Anyer-Panarukan, karena jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor, dengan dibangunnya jalan tersebut maka proses distribusi barang dan jasa untuk kepentingan kolonial semakin cepat dan efisien.

Pembangunan jalur Anyer Panarukan sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda membangun jalan. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak, akibatnya ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Pengerahan penduduk untuk mengerjakan berbagai proyek Belanda inilah yang disebut rodi atau kerja paksa. Kerja paksa pada masa Pemerintah Belanda banyak ditemukan di berbagai tempat. Banyak penduduk yang dipaksa menjadi budak dan dipekerjakan di berbagai perusahaan tambang mau- pun perkebunan. Kekejaman Belanda ini masih dapat kalian buktikan dalam berbagai kisah yang ditulis dalam buku-buku sejarah dan novel.

1. Sistem Sewa Tanah Rafles

Inggris juga pernah menjajah Indonesia pada masa tahun 1811-1816. Penguasa Inggris di Indonesia pada masa tersebut adalah Letnan Gubernur Thomas Stanford Raffles. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau landrent-system atau Landelijk Stelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan, antara lain sebagai berikut:

1. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut.
2. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah.
3. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai.
4. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala.

Sewa tanah tetap memberatkan rakyat, dan menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat Indonesia. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hasil sewa tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah. Kekuasaan Inggris selama 5 tahun di Indonesia, juga menghadapi perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Sebagai contoh adalah perlawanan besar rakyat Kesultanan Palembang pada tahun 1812. Sultan Sultan Mahmud Baharuddin menolak mengakui kekuasaan Inggris. Inggris kemudian mengirim pasukan dan menyerang kerajaan Palembang yang terletak di Sungai Musi. Perlawanan rakyat Palembang dapat dikalahkan oleh tentara Inggris, tetapi semangat kemerdekaan rakyat Palembang tetap membara. Inggris juga menghadapi perlawanan dari kerajaan besar di Jawa yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Namun sebelum kedua kerajaan melakukan penyerangan, Inggris berhasil meredam usaha perlawanan tersebut.

1. Tanam Paksa

Pada tahun 1830 Van den Bosch menerapkan Sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel). Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830), dan Perang Belgia (1830-1831). Tanam Paksa yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda memiliki ketentuan yang sangat memberatkan bagi masyarakat Indonesia. Apalagi pelaksanaan yang lebih berat karena penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai barat maupun pribumi. Praktik- praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain adalah :

Ketentuan bahwa tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat, kenyataanya selalu lebih bahkan sampai 1⁄2 bagian dari tanah yang dimiliki rakyat.

1. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan.
2. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari, dan tanpa imbalan yang memadai.
3. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak.
4. Melawan keserakahan penajajah
5. Perlawanan terhadap Persekutuan Dagang

Sultan Hasanuddin adalah raja Gowa di Sulawesi Selatan. Suatu ketika Kerajaan Gowa (Sultan Hasanuddin) dan Talo (Arung Palaka) berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. VOC memberikan dukungan, sehingga Talo menang saat perang dengan Gowa tahun 1666. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya 18 November tahun 1667. Perjanjian Bongaya baru terlaksana tahun 1669 karena Sultan Hasanuddin masih melakukan perlawanan kembali. Akhirnya Makassar harus menyerahkan benteng kepada VOC. Sejak masa itu tidak ada lagi kekuatan besar yang mengancam kekuasaan VOC di Indonesia Timur. Perjanjian Bongaya telah memangkas kekuasaan kerajaan Gowa sebagai kerajaan terkuat di Sulawesi. Tinggal kerajaan-kerajaan kecil yang sulit melakukan perlawanan terhadap VOC.

Kisah di atas merupaakan salah satu contoh perlawanan rakyat Indonesia di Sulawesi Selatan terhadap persekutuan dagang VOC. Masih banyak perlawanan di berbagai daerah dalam melawan persekutuan dagang Eropa di Indonesia. Kegiatan belajar berikut ini akan membantu kamu menelusuri berbagai perlawanan di berbagai daerah dalam menentang persekutuan dagang Barat. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian antara Sultan Hasanuddin dengan VOC, yang isinya:

1. VOC mendapatkan wilayah yang direbut oleh Sultan Hasanuddin selama perang

Gowa dan Tallo.

1. Bima diserahkan kepada VOC.
2. Kegiatan pelayaran para pedagang Makassar dibatasi dibawah pengawasan VOC.
3. Penutupan Makassar sebagai bandar perdagangan bagi bangsa Barat, kecuali VOC.
4. Monopoli oleh VOC.
5. Alat tukar/mata uang yang digunakan di Makassar adalah mata uang Belanda.
6. Pembebasan cukai dan penyerahan 1.500 budak kepada VOC.

Pada tahun 1799 terjadi peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. VOC dinyatakan bangkrut hingga dibubarkan. Keberadaan VOC sebagai kongsi dagang yang menjalankan roda pemerintahan di negeri jajahan seperti di Indonesia tidak dapat dilanjutkan lagi. Pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Setelah dibubarkannya VOC Indonesia berada langsung di bawah pemerintah Hindia Belanda. Perlawanan terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Beberapa contoh perlawanan rakyat Indonesia terhadap Pemerintah Hindia Belanda adalah sebagai berikut:

1. Perang Saparua di Ambon

Merupakan perlawanan rakyat Ambon dipimpin Thomas Matulesi (Pattimura). Dalam pemberontakan tersebut, seorang pahlawan wanita bernama Christina Martha Tiahahu melakukan perlawanan dengan berani. Perlawanan Pattimura dapat dikalahkan setelah bantuan pasukan Belanda dari Jakarta datang. Pattimura bersama tiga pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung.

1. Perang Paderi di Sumatra Barat

Merupakan perlawanan yang sangat menyita tenaga dan biaya sangat besar bagi rakyat Minang dan Belanda. Bersatunya Kaum Paderi (ulama) dan kaum adat melawan Belanda, menyebabkan Belanda kesulitan memadamkannya. Bantuan dari Aceh juga datang untuk mendukung pejuang Paderi. Belanda benar-benar menghadapi musuh yang tangguh. Belanda menerapkan sistem pertahanan Benteng Stelsel. Benteng Fort de Kock di Bukit tinggi dan Benteng Fort van der Cappelen merupakan dua benteng pertahanannya. Dengan siasat tersebut akhirnya Belanda menang ditandai jatuhnya benteng pertahanan terakhir Paderi di Bonjol tahun 1837. Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kemudian diasingkan ke Priangan, kemudian ke Ambon, dan terakhir di Menado hingga wafat tahun 1864.

1. Perang Diponegoro 1825-1830

Perang Diponegoro merupakan salah satu perang besar yang dihadapi Belanda. Latar belakang perlawanan Pangeran Diponegoro diawali dari campur tangan Belanda dalam urusan politik Kerajaan Yogyakarta. Beberapa tindakan Belanda yang dianggap melecehkan harga diri dan nilai-nilai budaya masyarakat menjadi penyebab lain kebencian rakyat kepada Belanda. Belanda membangun jalan baru pada bulan Mei 1825. Mereka memasang patok-patok pada tanah leluhur Diponegoro. Terjadi perselisihan saat pengikut Diponegoro Patih Danureja IV mencabuti patok-patok tersebut. Belanda segera mengutus serdadu untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Perang tidak dapat dihindarkan, pada tanggal 20 Juli Tegalrejo sebagai basis pengikut Diponegoro direbut dan dibakar Belanda. Pada bulan Maret 1830 Diponegoro bersedia mengadakan perundingan dengan Belanda di Magelang, Jawa Tengah. Perundingan tersebut hanya sebagai jalan tipu muslihat karena ternyata Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian ke Makasar hingga wafat tahun 1855. Setelah berakhirnya Perang Jawa (Diponegoro), tidak lagi muncul perlawanan yang lebih berat di Jawa.

1. Perang Aceh

Semangat jihad (perang membela agama Islam) merupakan spirit perlawanan rakyat Aceh. Jendral Kohler terbunuh saat pertempuran di depan masjid Baiturrahman Banda Aceh. Kohler meninggal dekat dengan pohon yang sekarang diberi nama Pohon Kohler. Siasat konsentrasi stelsel dengan sistem bertahan dalam benteng besar oleh Belanda tidak berhasil. Belanda semakin terdesak, korban semakin besar, dan keuangan terus terkuras. Belanda sama sekali tidak mampu menghadapi secara fisik perlawanan rakyat Aceh. Menyadari hal tersebut, Belanda mengutus Dr. Snouck Hurgroje yang memakai nama samaran Abdul Gafar seorang ahli bahasa, sejarah ,dan sosial Islam untuk mencari kelemahan rakyat Aceh. Setelah lama belajar di Arab, Snouck Hugronje memberikan saran-saran kepada Belanda mengenai cara mengalahkan orang Aceh. Menurut Hurgronje, Aceh tidak mungkin dilawan dengan kekerasan, sebab karakter orang Aceh tidak akan pernah menyerah, jiwa jihad orang Aceh sangat tinggi. Taktik yang paling mujarab adalah dengan mengadu domba antara golongan Uleebalang (bangsawan) dengan ulama. Belanda menjanjikan kedudukan pada Uleebalang yang bersedia damai. Taktik ini berhasil, banyak Uleebalang yang tertarik pada tawaran Belanda. Belanda memberikan tawaran kedudukan kepada para Uleebalang apabila kaum ulama dapat dikalahkan. Sejak tahun 1898 kedudukan Aceh semakin terdesak. Belanda mengumumkan perang Aceh selesai tahun 1904. Namun demikian perlawanan sporadis rakyat Aceh masih berlangsung hingga tahun 1930-an.